



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 457 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 108);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Pll. Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Organisasi	


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060 / 457 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Pengawas Lingkungan Hidup - Ahli Madya	Fungsional	1
3.	Pengendali Dampak Lingkungan - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Madya	Fungsional	1
5.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
6.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
8.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
9.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
10.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	2
11.	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	2
12.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	2
13.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
14.	Pengemudi	Pelaksana	3
15.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
16.	Pramu Bakti	Pelaksana	2
17.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2
18.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1
19.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	1
20.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	1
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
22.	Bendahara	Pelaksana	1
23.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	2
24.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
25.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	3
27.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	1
28.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
29.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Administrator	1
30.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Pelaksana	2
31.	Analisis Dokumen Perizinan	Pelaksana	2
32.	Analisis Pengawasan	Pelaksana	2
33.	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	Pelaksana	2
34.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
35.	Pengendali Dampak Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	1
36.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	Administrator	1
37.	Penelaah Dampak Lingkungan	Pelaksana	1
38.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Pelaksana	1
39.	Analisis Pengawasan	Pelaksana	1
40.	Pengawas Lingkungan Hidup - Ahli Muda	Fungsional	3
41.	Pengawas Lingkungan Hidup - Ahli Pertama	Fungsional	2
42.	Pengendali Dampak Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	2
43.	Pengendali Dampak Lingkungan - Ahli Pertama	Fungsional	1
44.	Pengendali Dampak Lingkungan - Penyelia	Fungsional	1
45.	Pengendali Dampak Lingkungan - Mahir	Fungsional	1
46.	Pengendali Dampak Lingkungan - Terampil	Fungsional	1
47.	Penyuluh Lingkungan Hidup - Ahli Muda	Fungsional	2
48.	Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Pertama	Fungsional	1
49.	Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Penyelia	Fungsional	1
50.	Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Mahir	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Laksana Penyehatan Lingkungan - Terampil	Fungsional	1
52.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Administrator	1
53.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	4
54.	Pengelola Penataan Sampah	Pelaksana	2
55.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
56.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
57.	Pengemudi	Pelaksana	1
58.	Pengemudi	Pelaksana	1
59.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	3
60.	Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Kelola Penyehatan Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	8
61.	Pengawas Lingkungan Hidup - Ahli Pertama	Fungsional	4
62.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	Administrator	1
63.	Pengawas Bangunan dan Taman	Pelaksana	5
64.	Analisis Taman	Pelaksana	2
65.	Analisis Ketenagalistrikan	Pelaksana	2
66.	Pengawas Tata Pertamanan	Pelaksana	2
67.	Analisis Ketenagalistrikan	Pelaksana	1
68.	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	Pelaksana	5
69.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
70.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	5
71.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
72.	Pengemudi	Pelaksana	2
73.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	16
74.	Pramu Taman	Pelaksana	4
75.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Ahli Muda	Fungsional	3
UPKP Wilayah Ajibarang			
76.	Kepala UPKP Wilayah Ajibarang	Pengawas	1
77.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	2
78.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
79.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
80.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
81.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
82.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
83.	Pengemudi	Pelaksana	3
84.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
85.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	37
UPKP Wilayah Banyumas			
86.	Kepala UPKP Wilayah Banyumas	Pengawas	1
87.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	1
88.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
89.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
90.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
91.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
92.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
93.	Pengemudi	Pelaksana	3
94.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
95.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	22
UPKP Wilayah Purwokerto			
96.	Kepala UPKP Wilayah Purwokerto	Pengawas	1
97.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	2
98.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
99.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
100.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
101.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
102.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
103.	Pengemudi	Pelaksana	12
104.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
105.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	146
UPKP Wilayah Kembaran			
106.	Kepala UPKP Wilayah Kembaran	Pengawas	1
107.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	2
108.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
109.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
110.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
111.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
112.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
113.	Pengemudi	Pelaksana	2
114.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
115.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	25
UPKP Wilayah Sumpiuh			
116.	Kepala UPKP Wilayah Sumpiuh	Pengawas	1
117.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	2
118.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
119.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
120.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
121.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	3
122.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
123.	Pengemudi	Pelaksana	2
124.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
125.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	19
UPKP Wilayah Wangon			
126.	Kepala UPKP Wilayah Wangon	Pengawas	1
127.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	Pelaksana	2
128.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
129.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
130.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
131.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	1
132.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
133.	Pengemudi	Pelaksana	3
134.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
135.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	29
UPTTPST			
136.	Kepala UPT TPST	Pengawas	1
137.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	Pelaksana	2
138.	Pengelola Penataan Sampah	Pelaksana	4
139.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
140.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
141.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
142.	Teknisi Listrik dan Jaringan	Pelaksana	8
143.	Pengemudi	Pelaksana	4
144.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
145.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	32
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup			
146.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengawas	1
147.	Analisis Lingkungan Hidup	Pelaksana	2
148.	Pengelola Laboratorium	Pelaksana	2
149.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
150.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
151.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
152.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
153.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
154.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2
155.	Pengendali Dampak Lingkungan - Ahli Muda	Fungsional	2

(1)	(2)	(3)	(4)
156.	Pengawas Lingkungan Hidup - Ahli Muda	Fungsional	2

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN